

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam waktu sekarang yang serba digital, adanya sistem informasi menjadi amat krusial. dalam berbagai aspek, termasuk perencanaan keuangan di sektor publik. dalam instansi pemerintahan teknologi sistem informasi telah menjadi kebutuhan yang penting guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi. Dengan kemajuan teknologi informasi tata kelola akan terlaksanakan dengan baik dan akurat. Sistem informasi yang efektif menyediakan data yang relevan sehingga informasi disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat mengambil keputusan membuat pilihan yang lebih baik berdasarkan bukti.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi informasi guna memperlancar pengelolaan data barang milik daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan jumlah transaksi tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam mengelola Barang Milik Daerah. Untuk mencapai hal itu, Pemerintahan daerah memanfaatkan teknologi informasi Dalam pengelolaan Aset Daerah, agar pelaksanaannya berjalan dengan efisien sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014.

Menurut laporan hasil audit BPK antara tahun 2011 sampai dengan 2015, pengelolaan aset daerah yang terus tumbuh dan rumit belum bisa dilakukan secara maksimal oleh pemerintah, disebabkan oleh masih adanya beberapa masalah. Salah satu isu adalah pengelolaan aset daerah di SKPD yang belum didukung oleh teknologi dan tenaga kerja yang terampil, serta pengelola barang di SKPD yang belum menguasai penggunaan komputer dan belum memahami pengelolaan aset daerah dengan baik. Di samping itu, terdapat keterlambatan dalam penginputan data karena prosesnya masih dilakukan secara manual.

Pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber dayanya untuk menghadapi perubahan, mendorong penerapan Pengaturan dana daerah harus sesuai dengan peraturan yang ada, agar dapat berlangsung secara efisien, efektif, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diperiksa. Salah satu bidang teknologi informasi yang mengalami perkembangan sangat cepat adalah perangkat lunak (Himanen, 2019). Salah satu aplikasi yang dipakai untuk mendukung proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di Sumatera Barat menggunakan Sistem Informasi untuk Perencanaan dan Penetapan Harga yang disebut SIPAGA. SIPAGA dirancang untuk mempermudah perencanaan dan pengelolaan anggaran pengadaan barang milik daerah, serta memberikan kemudahan akses informasi terkait harga yang sesuai dengan kebutuhan instansi.

Sistem Informasi Perencanaan dan Harga (SIPAGA) adalah platform yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). SIPAGA mencakup dua aplikasi, yaitu Sistem Informasi Standar Harga Barang dan Jasa (SISHBJ) serta Sistem

Informasi Perencanaan Barang Milik Daerah (SIPBMD). Aplikasi ini dibuat dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang akurat, relevan, dan diperoleh pada waktu yang tepat (Salam, 2022).

SIPAGA menggunakan pengolahan data elektronik untuk memudahkan pengelolaan aset daerah. Pelaksanaan SIPAGA berlandaskan pada berbagai regulasi yang berlaku, seperti UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 27 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Aset Negara/Daerah, dan Permendagri No. 19 tahun 2016 mengenai Panduan Pengelolaan Aset Daerah. Ini menjamin bahwa tahapan penyusunan RKBMD berlangsung secara sah dan terbuka.

RKBMD adalah dokumen penting yang dimanfaatkan oleh pemerintah setempat dalam merancang kebutuhan akan barang milik daerah. Perencanaan RKBMD yang benar sangat berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah dan pemanfaatan anggaran. Dalam konteks BPKAD Sumatra Barat, penggunaan SIPAGA diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan RKBMD serta meminimalkan kesalahan yang sering terjadi akibat pengolahan data manual. Tujuan ini juga sejalan dengan langkah pemerintah untuk memperbaiki keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran daerah.

Proses penyusunan RKBMD sering Dalam setiap situasi, ada banyak rintangan yang harus dilalui, contohnya adalah terbatasnya tenaga kerja, serta minimnya pemahaman tentang prosedur yang benar, serta kesulitan dalam

mengakses data yang diperlukan. Dengan adanya aplikasi SIPAGA, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diminimalisir.

SIPAGA dirintis oleh Noveardi Saipunir, SE dan Cendra Wadisman, M. Kom, pada bulan Desember tahun 2018 ketika aplikasi ini pertama kali diciptakan. Setelah desain dianalisis, pada akhir bulan Desember diadakan pembicaraan mengenai SIPAGA kepada OPD Pemprov Sumbar dan sampai saat ini aplikasi ini masih dalam proses pengembangan oleh tim SIPAGA. Pemanfaatan dan penerapan SIPAGA telah memberikan sumbangan dalam penyusunan Standar harga dan RKBMD. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas saya sebagai penulis sangat berminat dalam mengetahui dan ingin mengangkat judul yaitu ” **Efektifitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Dan Harga (SIPAGA) dalam mendukung prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pada BPKAD Provinsi Sumatra Barat**”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas penggunaan aplikasi SIPAGA dalam mendukung Prosedur Penyusunan RKBMD pada BPKAD Sumatra Barat ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan Aplikasi sistem informasi Perencanaan Dan Harga (SIPAGA) dalam mendukung penyusunan RKBMD di BPKAD Sumatra Barat ?
3. Bagaimana solusi permasalahan penggunaan Aplikasi sistem informasi Perencanaan Dan Harga (SIPAGA) dalam mendukung penyusunan RKBMD di BPKAD Sumatra Barat ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.1 Untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi seberapa efektif aplikasi SIPAGA dalam mendukung Prosedur Penyusunan RKBMD di BPKAD Sumatra Barat.
- 1.2 Untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi saat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Harga (SIPAGA) dalam meningkatkan efektivitas penyusunan RKBMD di BPKAD Sumatra Barat.

1.3 Untuk mengetahui solusi permasalahan penggunaan Aplikasi sistem informasi Perencanaan Dan Harga (SIPAGA) dalam mendukung efektivitas penyusunan RKBMD di BPKAD Sumatera Barat.

#### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode Kualitatif yang meliputi pengamatan dan wawancara di lokasi selama 40 hari di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Barat. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui kunjungan langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Barat.

Menurut (Creswell dan Guetterman, 2018), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti sangat bergantung pada informasi dari objek atau partisipan dalam lingkup yang luas, dengan pertanyaan yang bersifat umum. Proses pengumpulan data umumnya bersumber dari tulisan atau perkataan partisipan, serta menjelaskan dan menganalisis informasi yang didapat dengan cara yang subjektif. Dengan kata lain, metode ini dilakukan di lapangan melalui observasi, wawancara, pencatatan, dan pengamatan. apakah penerapan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Dan Harga (SIPAGA) efektif dalam mendukung prosedur penyusunan RKBMD pada BPKAD Sumatera Barat.

Dalam Penelitian ini peneliti memilih beberapa kriteria efektif berdasarkan beberapa aspek berikut beberapa kriteria khusus yang ingin penulis pilih dan kembangkan sesuai metode penelitian ini :

### 1. Waktu (Time)

Menurut Kerzner (1979), waktu adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan proyek. Proyek yang selesai tepat waktu menunjukkan manajemen yang baik dan perencanaan yang efektif. Misalnya, jika sebelumnya proses penyusunan RKBMD secara manual memakan waktu 10 hari, dan dengan diciptakannya aplikasi SIPAGA menjadi 5 hari. Pengurangan waktu ini dapat mencerminkan perbaikan dalam prosedur, penggunaan teknologi, atau peningkatan dan menunjukkan peningkatan efisiensi.

### 2. Tingkat Kesalahan (Error Rate)

Menurut Hatry (1999) mengurangi kesalahan dalam proses adalah tanda dari peningkatan kualitas dan efisiensi. Misalnya, Jika sebelumnya terdapat 10 kesalahan dan setelah perbaikan menjadi nol kesalahan. Hal ini menunjukkan adanya alat bantu yang lebih efektif dan prosedur yang lebih jelas untuk mengurangi tingkat kesalahan.

### 3. Ketepatan Waktu (Timeliness)

Menurut Kerzner (2017) ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek adalah indikator penting dari efektivitas. Proyek yang selesai sesuai jadwal menunjukkan kemampuan manajer proyek dalam merencanakan dan mengelola waktu. Misalnya, Jika sebelumnya penyusunan sering terlambat hingga 10 hari, dan setelah perbaikan menjadi tepat waktu (nol hari keterlambatan), ini menunjukkan bahwa proses telah dioptimalkan untuk memenuhi tenggat waktu.

## 1.5 Manfaat Pengumpulan Data

Sehubungan dengan kegiatan magang yang penulis lakukan diharapkan bisa mendapatkan manfaat yaitu:

### 1. Manfaat bagi penulis

Diharapkan penulisan ini bisa memperluas pemahaman dan perspektif tentang Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Dan Harga (SIPAGA) Dalam Mendukung Prosedur Penyusunan RKBMD Pada BPKAD Sumatra Barat.

### 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada khalayak yang ingin mengetahui dan membahas lebih tentang prosedur penyusunan RKBMD dalam penerapan Aplikasi SIPAGA di BPKAD Sumatra Barat.

## 1.6 Tempat Dan Waktu Penelitian

Pemilihan tempat untuk penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Barat, yang terletak di Jln. Khatib Sulaiman No. 43, Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat. Kegiatan magang ini akan dilaksanakan selama 40 hari kerja, yang dimulai dari bulan Januari sampai Maret 2025.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan tugas akhir ini dikelompokkan dalam lima bab, yaitu:

## **BAB I : Pendahuluan**

Bab pengantar terbagi menjadi delapan sub bab yang meliputi: konteks masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dari program magang, manfaat dari magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, batasan analisis, serta sistem penulisan.

## **BAB II : Landasan Teori**

Bab landasan teori membahas mengenai definisi efektifitas penggunaan secara umum di Indonesia, Penggunaan Aplikasi SIPAGA dalam mendukung prosedur penyusunan RKBMD.

## **BAB III : Gambaran Umum Institusi**

Bab ini menerangkan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya perusahaan, visi misi, struktur organisasi.

## **BAB IV : Analisis Dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan dan membahas lebih lanjut tentang hasil dari kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan mengenai “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Dan Harga (SIPAGA) Dalam Mendukung Proses Penyusunan RKBMD Di BPKAD Sumatra Barat”.

## **BAB V : Penutup**

Di akhir, disampaikan ringkasan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan tentang masalah yang ada serta saran-saran yang dianggap perlu untuk diperhatikan dalam upaya perbaikan dan perubahan di masa yang akan datang.